

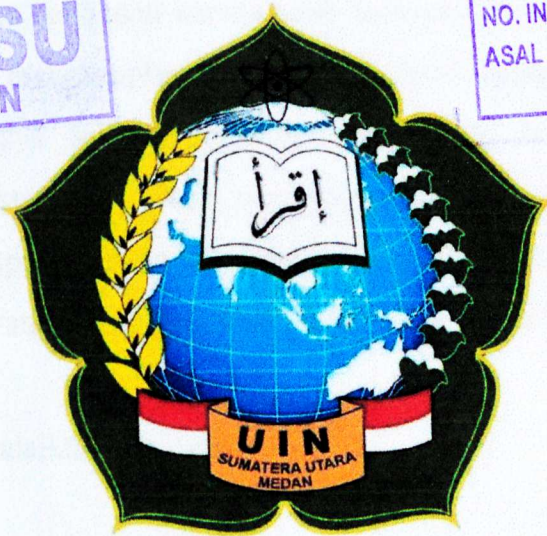
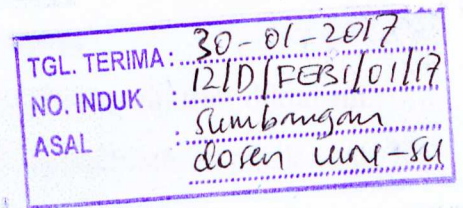
BUKU DIKTAT

# PERBANKAN SYARIAH

Oleh

TRI INDA FADHILA RAHMA, M.E.I

NIP. 19910129 201503 2 008



D  
2.X4.27  
RAH  
C.1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2017

بسم الله الرحمن الرحيم

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan diktat yang berjudul Perbankan Syariah ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga syafaatnya kita peroleh di yaumul akhir kelak.

Penulisan diktat ini sebagai bahan perkuliahan yang menyajikan tentang Perbankan Syariah secara dasar dan umum untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Penulis berharap diktat ini dapat bermanfaat dalam mengkaji ilmu tentang Perbankan Syariah.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan penulisan diktat ini. Disamping itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya selama pembuatan diktat ini berlangsung sehingga terealisasikanlah diktat ini. Penulis juga menyadari bahwa diktat ini mungkin masih jauh dari sempurna, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang dapat membuat diktat ini menjadi lebih baik. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum, wr, wb

Medan, Januari 2017

Penulis



Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I  
NIP. 19910129 201503 2 008



## Daftar Isi

ii

<b>BAB I.</b>	<b>Pengertian Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional</b>	<b>1</b>
A.	Pengertian Bank	
B.	Pengertian Bank Syariah	2
C.	Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	5
	Soal Diskusi	9
<b>BAB II.</b>	<b>Sejarah Perkembangan Bank Syariah</b>	<b>10</b>
A.	Sejarah Bank	10
B.	Sejarah Perbankan Di Indonesia	10
C.	Sejarah Perbankan Syariah	11
D.	Perbankan di Jaman Bani Abbasiyah	11
E.	Perbankan Syariah Modern	13
F.	Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	14
	Soal Diskusi	15
<b>BAB III.</b>	<b>Peraturan Perbankan Syariah</b>	<b>16</b>
A.	Sumber Hukum Perbankan Syariah	16
B.	Dasar Hukum Perbankan Syariah	17
C.	Tinjauan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia	19
D.	Regulasi Peraturan Perbankan Syariah	21
	Soal Diskusi	27
<b>BAB IV.</b>	<b>Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah</b>	<b>28</b>
A.	Tabungan ( <i>Saving Deposit</i> )	28
	1. Tabungan <i>Wadiah</i>	28
	2. Tabungan <i>Mudharabah</i>	31
B.	Giro ( <i>Demand Deposit</i> )	34
	1. Giro <i>Wadiah</i>	34

	2. Giro Mudharabah	
	C. Deposito Mudharabah	
	Soal Diskusi	
<b>BAB V.</b>	<b>Produk Penyaluran Dana Perbankan Syariah</b>	
	A. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli ( <i>Bai'</i> )	
	1. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
	2. <i>Salam</i>	
	3. <i>Istishna</i>	
	B. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa ( <i>Ijarah</i> )	
	C. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil ( <i>Syirkah</i> )	
	1. <i>Musyarakah</i>	
	2. <i>Mudharabah</i>	
	Soal Diskusi	
<b>BAB VI.</b>	<b>Produk Jasa Perbankan Syariah</b>	
	A. Pengertian Jasa Bank	
	B. Jenis Pelayanan Jasa Bank	
	C. Jenis Pelayanan Jasa Bank Dalam Syariah	
	Soal Diskusi	
<b>BAB VII.</b>	<b>Peran Sosial Perbankan Syariah</b>	
	A. Fungsi Bank Syariah	
	B. Peran Bank Syariah	
	Soal Diskusi	
<b>BAB VIII.</b>	<b>Pengelolaan Sistem Keuangan Perbankan Syariah</b>	
	A. Prinsip Pengelolaan Sistem Keuangan Perbankan Syariah	
	B. Sumber-Sumber Dana Bank Syariah	
	C. Penggunaan Dana Bank Syariah	
	D. Pembagian Keuntungan ( <i>Profit Distribution</i> )	
	Soal Diskusi	

<b>BAB IX.</b>	<b>Kapita Selekt : Pengembangan Bank Syariah di Indonesia</b>	85
	A. Tantangan Perbankan Syariah	85
	B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia	87
	C. <i>Grand Strategy</i> Pengembangan Pasar Perbankan Syariah	88
	Soal Diskusi	89
	<b>Daftar Pustaka</b>	91
	<b>Daftar Istilah</b>	93
	<b>Daftar Singkatan</b>	94



# **BAB I. PENGERTIAN PERBANKAN SYARIAH DAN PERBEDAANNYA DENGAN BANK KONVENSIONAL**

## **Tujuan Intruksional**

1. Menjelaskan pengertian bank
2. Menjelaskan pengertian bank syariah
3. Menjelaskan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

## **A. Pengertian Bank**

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknote.

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan pokok bank ialah menghimpun dan menyalurkan dana sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Bank dalam kegiatannya menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian memberikan balas jasa berupa bunga. Kegiatan menyalurkan dana yakni berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Usaha-usaha atau kegiatan perbankan yakni sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang



4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang diserahkan tersebut wajib dicairkan secepatnya
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti Bank yang tata cara beroprasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al hadist. Muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antar

peorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*ba'i*), bunga (*riba*), piutang, gadai (*rahn*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qira'ah*), jaminan (*dhomah*), persekutuan (*syirkah*), persewaan dan perburuan (*ijarah*).

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabah, pembayaran dan penarikan bunga di larang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Menurut Ismail, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah yang menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana.

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari beberapa pengertian bank syariah yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, yang tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) pada satu sisi, dan sisi lain, bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (*deficit unit*).



Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank syariah dan tidak dilakukan oleh bank konvensional menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah Pasal 19 s.d 21 adalah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau lainnya, dan bentuk investasi berupa tabungan, deposito atau bentuk berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan untuk transaksi jual-beli dengan berbagai akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan penyewaan kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah.
8. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
9. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga berdasarkan suatu akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
10. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad wakalah berdasarkan prinsip syariah.
11. Melakukan fungsi Wali Amanat berdasarkan akad wakalah.
12. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga, memindahkan dan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
14. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip syariah.
17. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
18. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
19. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
20. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

Dalam perbankan syariah terdapat pihak terafiliasi adalah:

1. Komisaris, direksi atau kuasanya pejabat dan karyawan bank syariah.
2. Dewan pengawas syariah, akuntan public, penilai dan konsultan hukum.

## **B. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan.

Bank konvensional memperoleh keuntungan berasal dari bunga sedangkan bank syariah dalam kegiatan atau usaha yang dijalankan yakni memperoleh keuntungan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha), dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan



bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya.

Terdapat perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut,

1. **Falsafah** : pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
2. **Operasional** : pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi bank akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3. **Sosial** : pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
4. **Organisasi** : bank syariah harus memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah). Sementara itu bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari empat aspek lain, yaitu sebagai berikut;

#### 1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah bank kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap bank dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

#### 2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan Majelis Ulama Indonesia.

#### 3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

#### 4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilakukan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

#### 5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*) dan mampu melaksanakan tugas secara team-work di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi



(*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas esensi dan karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dirangkum sebagai berikut:

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intermediasi</li> <li>- Jasa Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intermediasi</li> <li>- Manajer Investasi</li> <li>- Investor</li> <li>- Sosial</li> <li>- Jasa Keuangan</li> </ul>
Mekanisme dan Objek Usaha	Bebas	Anti riba dan anti <i>maysir</i>
Prinsip Dasar Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bebas nilai (prinsip materialis)</li> <li>- Uang sebagai komoditi</li> <li>- Bunga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam)</li> <li>- Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi</li> <li>- Bagi hasil, jual beli sewa</li> </ul>
Prioritas Pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan ( <i>profit</i> )	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan ( <i>profit sharing</i> )
Bentuk	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-purpose</i>
Evaluasi Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga ( <i>creditworthiness</i> dan <i>collateral</i> )	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam resiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha

Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Resiko Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank</li> <li>- Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran</li> <li>- Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i></li> </ul>
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halan atau haram	Halal
Lingkungan dan Budaya Kerja	Non- Islami	Islami

### Soal Diskusi

1. Jelaskan pengertian bank?
2. Jelaskan pengertian bank syariah?
3. Jelaskan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional?



## BAB II. SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

### Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan tentang sejarah bank
2. Menjelaskan tentang sejarah perbankan di Indonesia
3. Menjelaskan tentang sejarah perbankan syariah
4. Menjelaskan tentang perbankan di jaman Bani Abbasiyah
5. Menjelaskan tentang perbankan syariah modern
6. Menjelaskan tentang perkembangan bank syariah di Indonesia

### A. Sejarah Bank

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dilakukan oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Afrika maupun benua Amerika.

Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya dilakukan di kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (Money Changer). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan.

Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

### B. Sejarah Perbankan di Indonesia

Perbankan di Indonesia berkembang sejak zaman Belanda. Lembaga bank pertama didirikan di Batavia pada tanggal 10 Oktober 1827 yang bernama De Javasche Bank. Tujuan didirikannya lembaga perbankan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. Seiring perkembangan

*Javasche Bank*, bermunculan bank-bank yang dikelola oleh swasta, seperti bank *Escomto*, *Rotterdamsche Bank*, *Nederland Handelsbank*, dan *Internatio*. Bank-bank tersebut bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan ekspor dan impor.

Pada tahun 1896, seorang penduduk pribumi yaitu patih dari Purwokerto yang bernama R. Aria Wirya Atmaja mendirikan bank yang diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaar Bank*). Tujuan didirikannya bank tersebut adalah untuk membantu para anggotanya agar terhindar dari para rentenir dan tengkulak yang sering memeras. Bank Penolong dan Tabungan ternyata berkembang sangat pesat. Akhirnya oleh pemerintah Belanda, Bank Penolong dikembangkan lagi dan diberi nama *Hulp Spaar en Hanbow Credit Bank* dan selanjutnya namanya diganti menjadi *Algemene Volks Credit Bank*. Kemudian, namanya berubah lagi menjadi Bank Rakyat Indonesia. Begitu juga *De Javasche Bank*, setelah Indonesia merdeka namanya diganti menjadi Bank Indonesia (1951).

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan, antara lain:

1. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari DE ALGEMENE VOLKSCREDIET bank atau Syomin Ginko.
3. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
6. Indonesia Banking Corporation tahun 1946 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
8. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.

### C. Sejarah Perbankan Syari'ah

#### 1. Perbankan di Jaman Bani Abbasiyah

Di jaman Bani Abbasiyah, *jihbiz* populer sebagai suatu profesi penukaran uang. Pada jaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari



emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan munculnya fulus, timbul kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis fulus dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang. Pada zaman itu, *jihbiz* tidak saja melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Bila di zaman Rasulullah SAW satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu, maka pada zaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi utama perbankan dilakukan oleh satu individu *jihbiz*.

Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul di masyarakat belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadist yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit.

Begitu pula Islam menyikapi perbankan atau *jihbiz*. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Nah, dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.

Dari definisi riba, sebab (*illat*) dan tujuan (*hikmah*) pelarangan riba, maka dapat diidentifikasi praktik perbankan konvensional yang tergolong riba. Riba dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan / deposito / giro. Riba jahiliyah dapat ditemui dalam transaksi kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

Jelaslah bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan praktik perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Lima transaksi yang lazim dipraktikkan oleh perbankan syariah :

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*).
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*).
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadi'ah*).

## 2. Perbankan Syariah Modern

Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha tersebut tidak sukses. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan Negara itu.

Pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Di Mesir bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan.

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga timbulah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Setelah berdirinya OKI dimana salah satu agendanya adalah mendirikan bank Islam, maka akhirnya pada bulan Oktober 1975 terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mendirikan bank Islam dinegaranya masing-masing, dan memainkan peran penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark.



### 3. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

Pendirian bank syariah diawali dengan berdiri dua bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 yakni BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera serta PT BPRS Heraukat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia diparkarai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" di Cisarua, Bogor 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuk tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdiri PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank

syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir hingga tahun 2016 jumlah bank syariah di Indonesia dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Bank Syariah Tahun 2013**

Keterangan	Jumlah Bank					
	2009	2010	2011	2012	2013	2016
Bank Umum Syariah (BUS)	6	11	11	11	11	12
Unit Usaha Syariah (UUS)	25	23	24	24	23	22
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	139	150	155	158	160	161

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, tahun 2016

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan tahun 2016 telah mengalami perubahan, serta jumlah jaringan kantor meningkat. Sehingga pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) dari sebelumnya sebanyak 711 menjadi 2.121.

Perkembangan tentunya memberikan harapan yang positif bagi perkembangannya pada tahun 2017. Namun hal yang menonjol pada tahun ini adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan yang signifikan akibat perlambatan pada sisi pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK). Optimisme untuk tetap tumbuh masih terpelihara dalam industri perbankan syariah.

#### Soal Diskusi

1. Jelaskan asal mula sejarah bank?
2. Jelaskan sejarah perbankan syariah
3. Jelaskan sejarah perbankan di jaman Bani Abbasiyah?
4. Jelaskan perkembangan bank syariah di Indonesia



### BAB III. PERATURAN PERBANKAN SYARIAH

#### Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan sumber hukum perbankan syariah
2. Menjelaskan dasar hukum perbankan syariah
3. Menjelaskan tinjauan hukum perbankan syariah di Indonesia
4. Menjelaskan regulasi bagi bank syariah

#### A. Sumber Hukum Perbankan Syariah

Bank-bank syariah memiliki dua jenis hukum, yaitu Hukum Syariah dan Hukum Positif. Yang dimaksud dengan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti bank syariah adalah lembaga keuangan maka, bank syariah juga tunduk pada **Undang-Undang no.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998**. Dengan diundangkannya **Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah** yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi bank-bank syariah, maka bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut.

Bank-bank syariah biasanya berbentuk perseroan terbatas, maka bank-bank syariah yang berbentuk perseroan terbatas itu tunduk pula pada **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**. Bagi suatu bank syariah berlaku pula anggaran dasar dari bank tersebut sebagaimana anggaran dasar itu dibuat oleh notaris pada waktu pendiriannya. Apabila bank syariah tersebut merupakan perseroan terbuka, yaitu perseroan yang telah terdaftar sahamnya dipasar modal, maka bank tersebut harus tunduk pula pada **Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan berbagai peraturan BAPEPAM**.

Berdasarkan Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui Unit Usaha Syariah yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar Prinsip Syariah.

Untuk memahami hukum Islam sebagai sumber hukum bagi transaksi muamalah dibawah ini dijelaskan hal-hal yang menyangkut berbagai sumber hukum Islam yang dipedomi oleh bank-bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar

melanggar Prinsip Syariah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah. Pemahaman tersebut sangat penting oleh karena akad-akad muamalah yang dibuat oleh bank-bank syariah yang melanggar Prinsip Syariah Perbankan akan mengakibatkan akad-akad muamalah tersebut menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan keabsahan suatu transaksi perbankan berdasarkan Prinsip Syariah (transaksi muamalah, tolak ukur untuk pengujiannya adalah terutama sumber-sumber hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Ketentuan Perundang-undangan khususnya KUH perdata tentang Perikatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan-peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah.
5. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) sebagaimana fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan *Al-Qur'an* dan *as-sunnah* sebagai sumber hukum Islam
6. Fatwa-fatwa berbagai mazhab tentang transaksi keuangan syariah sepanjang belum ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7. Putusan-putusan pengadilan Agama Indonesia dan putusan-putusan Badan Syariah Nasional (BASYARNAS) Majelis Ulama Indonesia.
8. Berbagai pandangan/ doktrin dari para ilmuwan hukum mengenai aspek-aspek hukum berbagai produk finansial syariah.

#### B. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif atau yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan



berkembang pada umumnya diseluruh Ibukota provinsi dan Kabupaten di Indonesia bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya). Pengertian secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembangnya kegiatan perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah dan Bank Muamalat serta bank konvensional yang membuka unit syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Beberapa rumusan garis hukum adalah sebagai berikut :

- Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang dibiayai dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menjelaskan : (1) dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan, dan (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

### C. Tinjauan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia

Sebenarnya dunia perbankan di Indonesia sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Bahkan bank-bank yang ada pada saat itu pun sesungguhnya adalah bank-bank bekas peninggalan penjajah Belanda yang telah dinasionalisasi. Perbankan yang ada di awal-awal kemerdekaan sampai dengan adanya deregulasi perbankan pada tahun 1988 merupakan bank yang secara keseluruhan mendasar pengelolaannya pada prinsip bunga (*interest*). Seiring dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki suatu lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*riba*), maka dibutuhkan rangkaian upaya secara yuridis dan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia lebih tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan demikian, secara tegas dapat dikatakan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, eksistensi dari Perbankan Syariah di Indonesia benar-benar telah diakui. Hal ini tampak dalam kata-kata bank berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam pasal ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

12/10/2017





Semula pengaturan mengenai produk-produk perbankan syariah didasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kemudian produk hukum berupa fatwa secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat umum (terbatas pada orang yang meminta fatwa), maka ada pendapat bahwa fatwa dibuat oleh DSN MUI hendaknya dijadikan sebagai hukum positif dengan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun Fatwa DSN MUI yang terkait dengan produk-produk perbankan syaria antara lain sebagai berikut :

1. Fatwa Nomor 01/DSN –MUI/IV/2000 tentang Giro.
2. Fatwa Nomor 02/DSN –MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Fatwa Nomor 04/DSN –MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
4. Fatwa Nomor 05/DSN –MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
5. Fatwa Nomor 06/DSN –MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.
6. Fatwa Nomor 07/DSN –MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Mengingat kewenangan pengaturan terhadap bank secara teknis ada pada Bank Indonesia, maka ketenyuan yang ada dalam Fatwa DSN tepat jika dimasukkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Untuk itu, pada Tahun 2005 keluarlah PBI No. 7/46/PBI tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemudian untuk mempersamakan cara pandang bagi setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas dirasa perlu menetapkan ketentuan tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam peraturan Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa ini. Pasal 55 undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa: (1) penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi perjanjian; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah. Penjelasan pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya melalui

- (a) Musyawarah
- (b) Mediasi Perbankan
- (c) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lainnya
- (d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, aturan hukum yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah adalah hukum islam (syariah) sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Di samping itu, juga dalam konteks kehidupan suatu negara, maka hukum positif juga menjadi landasan hukum bagi bank islam dalam operasional kegiatan usahanya.

#### D. Regulasi Peraturan Perbankan Syariah

##### 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda. Untuk menertibkan praktik lembaga pelepas uang yang banyak terjadi pada waktu itu, dikeluarkanlah peraturan, baik dalam bentuk undang-undang maupun berupa surat keputusan resmi dari pihak pemerintah. Diantara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu *De Javasche Bank N.V*, tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dikeluarkan undang-undang *De Javasche Bank Wet 1872*. Bank inilah yang kemudian menjadi Bank Indonesia, setelah melalui proses nasionalisasi pada tahun 1951, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 6 Desember 1951.

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Dimana akan berhubungan dengan kedudukan perbankan syariah pada masa berlakunya Undang-Undang ini adalah adanya pengaturan mengenai pengertian “kredit” yang terdapat di dalamnya.

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. Dari bunyi pasal di atas tampak pengertian, bahwa usaha perbankan



yang ada pada masa itu (perbankan konvensional) operasionalnya menggunakan kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga.

Hal ini dikarenakan konsep bunga melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Sehingga, tidak dimungkinkan perbankan syariah untuk didirikan, sebab kegiatan bank pada masa itu harus menggunakan bunga. Bahkan perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam, agar tidak terdapat penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

## 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 1 November 1992, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksistensi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dengan komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini dikategorikan sebagai 'bank dengan sistem bagi hasil', tidak terdapat rician landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Sistem bagi hasil dalam Undang-Undang ini hanya diuraikan sepintas lalu dan merupakan 'sisip belaka'. Ketentuan bagi hasil tersebut diatur dalam Pasal 6 Huruf i, dimana disebutkan bahwa Bank Umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam Pasal 13 huruf c, yang menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan prinsip bagi hasil kemudian ditaungkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan Pemerintah ini memberi makna bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 disebutkan bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari'at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

## 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perkembangan perbankan Syariah sangat pesat dan menjanjikan prospek yang menguntungkan. Meskipun eksistensi bank Syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa Undang-Undang tersebut memang belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank Syariah karena masih menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur bank Syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank Syariah.



Tahun 1998 lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut mengatur lebih rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan. Undang-Undang tersebut memberi arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri menjadi bank syariah. Walaupun Undang-Undang ini belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Dalam penjelasan umumnya Undang-Undang ini menyebutkan bahwa per bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka cabang-cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan mengenai bank syariah diatur dalam Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 29 dan Pasal 37. Pada Pasal 6 huruf m, disebutkan bahwa Usaha Bank Umum adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian dalam Pasal 13 huruf c, disebutkan bahwa Usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kemudian pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut telah mengamanatkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank Syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam Peraturan Bank Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi

hukum bagi keberadaan dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan Syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.

Upaya pengembangan perbankan Syariah di Indonesia tidak semata-mata hanya merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank Syariah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir). Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan Syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang sedemikian rupa dapat menciptakan perekonomian yang tangguh. Yaitu perekonomian yang pertumbuhan sektor keuangannya sejalan dengan pertumbuhan sektor riil.

#### 4. Undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maysir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi



fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Bank Indonesia di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah. Keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 memiliki beberapa ketentuan yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu meliputi:

- Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara bank dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
- Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti akuntan publik, konsultan dan penilai.
- Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya tentang perbankan (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat mencakup transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

Kemudian Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" setelah kata "bank" atau "Unit Usaha Syariah". Sedangkan Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama pada kantor Unit Usaha Syariah yang bersangkutan. Selain mendirikan

Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Pengubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini. Disamping itu, pendirian Bank Umum Syariah baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah dari induknya yang dilakukan secara sukarela atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban.

### Soal Diskusi

- Jelaskan sumber hukum perbankan syariah?
- Jelaskan dasar hukum perbankan syariah?
- Jelaskan tinjauan hukum perbankan syariah di Indonesia?
- Jelaskan regulasi bagi bank syariah?



## BAB IV. PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PERBANKAN SYARIAH

### Tujuan Instruksional:

1. Menjelaskan tentang produk tabungan dalam perbankan syariah dan jenisnya.
2. Menjelaskan tentang produk giro dalam perbankan syariah dan jenis-jenisnya.
3. Menjelaskan tentang produk deposito dalam perbankan syariah

### A. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

#### 1. Tabungan *Wadiah*

*Wadiah* adalah akad antara pemilik dengan penyimpan, untuk melindungi harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

Landasan Syariah QS Annisa (4):58 :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”

Hadis Riwayat Dawud dan Al Tirmidzi :

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”

*Wadiah* terdiri dari dua jenis, yakni sebagai berikut:

##### a. *Wadiah Yad Amanah*

*Wadiah Yad Amanah* (kepercayaan) ialah dimana penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

Ciri-ciri *Wadiah Yad Amanah* adalah sebagai berikut:

- Penerima titipan (*costodian*) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*)
- Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan
- Harta dalam titipan tidak dapat digunakan
- Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan

Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*.

##### b. *Wadiah Yad Dhamanah*

*Wadiah Yad Dhamanah* (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro.

Ciri-ciri *Wadiah Yad Dhamanah*

- Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan
- Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan
- Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan
- Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan
- Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Karakteristik Umum Tabungan berdasarkan akad *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:



### 1) Bersifat titipan

Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara menjaga barang titipan tersebut. Ia tidak dibenarkan menggunakan dana dititipkan, kecuali atas izin pemiliknya.

### 2) Titipan bisa diambil kapan saja

Hal ini disebabkan sifatnya titipan, maka pemilik dana dapat menarik dan sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi harus selalu siap mengembalikan yang dititipkan.

### 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (ath) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karena bersifat titipan pula, maka tidak ada kewajiban bagi pihak menitipkan (nasabah) untuk memberikan imbalan apapun kepada bank, dan bank berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersial. Namun pihak bank boleh memberikan athaya (bo) kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di depan atau dituangkan di akad. Jadi, athaya ini murni adalah hak bank, maka nasabah tidak dapat menuntut diberikan.

Sedangkan konsep Bonus pada tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadi'ah
- Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*
- Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain
- Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening *wadi'ah*)

Persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *wadi'ah* berlaku menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana,
- Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah,
- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan

Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

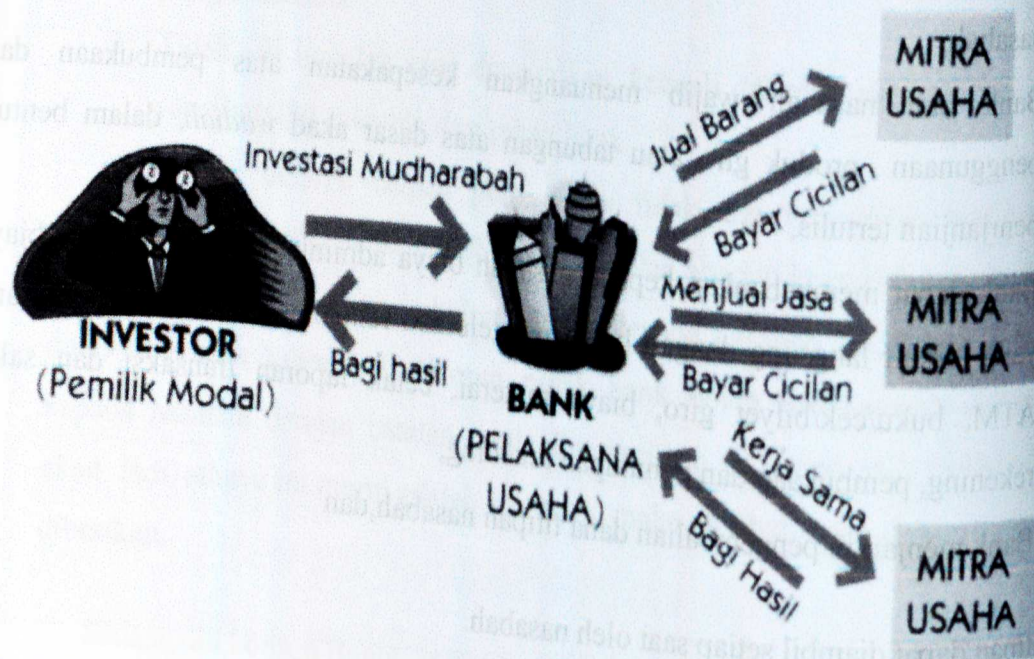
### Fasilitas Yang diperoleh dari Tabungan *Wadi'ah*

- Menggunakan buku atau kartu ATM
- Minimum setoran saldo pertama dan saldo minimum yang harus dipertahankan
- Tabungan tidak terbatas dapat ditarik sewaktu-waktu
- Tipe rekening :
  - ✓ Rekening perorangan
  - ✓ Rekening bersama atau beberapa individu
  - ✓ Perkumpulan/kelompok yang tidak berbadan hukum
  - ✓ Rekening perwalian, yang dioprasikan oleh orang tua wali atau wali atas nama pemegang rekening (yang belum dewasa)
- Pembayaran bonus dilakukan dengan mengkredit rekening tabungan



## 2. Tabungan Mudharabah

Mudharabah disebut juga *Muqarradah* yang berarti bepergian untuk dagang. Secara muamalah, Al-mudharabah adalah : Akad kerjasama antara pemilik (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah disepakati sebelumnya.



Jenis-jenis Mudharabah adalah sebagai berikut:

- *Mudharabah Muthlaqah* dimana pemilik (*shahibul maal*) dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*) (bank biasanya menggunakan prinsip tabungan dan deposito untuk jenis ini)
- *Mudharabah muqayyadah* dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dan pengguna dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. (untuk jenis ini akan dibahas pada topik pembiayaan)



Karakteristik Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*, yaitu:

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *mudharabah* berlaku menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*),
- Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*),
- Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atau deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah,
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati,



- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening
- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

#### Fasilitas yang diperoleh untuk tabungan

- Menggunakan buku tabungan
- Setoran awal minimum berdasarkan kebijakan bank
- Setoran berikutnya tidak dibatasi dan waktu penarikan sesuai dengan akad
- Bagi hasil dikreditkan pada rekening tabungan setiap akhir bulan
- Tipe tabungan :
  - Rekening perorangan
  - Rekening bersama (dua atau lebih)
  - Rekening organisasi yang tidak berbadan hukum
  - Rekening perwalian yang dioperasikan orang tua/wali
  - Rekening dijadikan jaminan pembiayaan
- Pengakhiran perjanjian tabungan terjadi bila tabungan ditutup

#### B. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu artinya adalah yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu sesuai dengan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 23, bahwa giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan.

##### 1. Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* merupakan bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip

yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Ketentuan umum Giro berdasarkan prinsip *wadiah* yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- Bersifat titipan
- Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 bahwa persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *wadiah* berlaku sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana,
- Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- Bank nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadiah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,



- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

#### Fasilitas yang diperoleh dari Giro *Wadiah*

- Kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening
- Ada minimum setoran awal, dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening
- Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam dari BI
- Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau instruksi tertulis lainnya
- Tipe rekening :
  - ✓ Rekening perorangan
  - ✓ Rekening bersama atau rekening kelompok/perkumpulan
  - ✓ Rekening perusahaan (Badan hukum)
- Servis lainnya :
  - ✓ Cek khusus
  - ✓ Instruksi siaga (standing instruction)
  - ✓ Transfer dana secara otomatis
- Pemegang rekening menerima salinan rekening (*account statement*) setiap bulan dengan rincian transaksi selama bulan yang bersangkutan.
- Bank dapat mengirim konfirmasi saldo kepada pemegang rekening setiap tahun atau setiap periode tertentu (yang lebih pendek) bila dianggap perlu oleh bank atau atas permintaan pemegang rekening.

## 2. Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* mendapatkan fasilitas yang sama dengan giro *wadiah*, namun yang membedakan adalah akad. Dalam Giro *mudharabah* Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 bahwa persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan akad *mudharabah* berlaku sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*),
- Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,
- Bank nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

## C. Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah atau UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.



Deposito terdiri dari beberapa jenis, yakni sebagai berikut:

a. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangannya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyalir.

b. Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu sama tanpa pemberitahuan dari penyalir.

Dalam Fatwa DSN No.03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkan termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- Bank diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan landasan hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI tersebut menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan akad mudharabah dan lainnya. Selain

mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank.

Fasilitas yang diperoleh untuk Deposito adalah sebagai berikut:

- Menggunakan sertifikat deposito atau bilyet deposito
- Minimum jumlah investasi ditentukan oleh bank
- Mempunyai jangka waktu (1, 3, 6, 12, 24 bulan dst)
- Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo, tetapi dapat diperpanjang (ARO)
- Bagi hasil diberikan pada saat jatuh tempo, interim bagi hasil dapat diberikan setiap periode yang diperjanjikan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan dimuka. Bank dapat memberikan bagi hasil melebihi tetapi tidak boleh kurang dari nisbah yang diperjanjikan. Kelebihan bagi hasil atas nisbah dianggap bonus.
- Berdasarkan proyek khusus dimana bank ingin membiayai. Penggunaan dana investasi khusus bersifat *back to back*
- Jumlah investasi tergantung pada proyek biasanya dalam jumlah besar
- Jangka waktu investasi mengikuti jangka waktu proyek
- Pembayaran keuntungan tergantung pada kemajuan/penerimaan keuntungan oleh proyek
- Nisbah bagi hasil ditetapkan kedua belah pihak, biasanya tergantung pada tingkat kelayakan proyek yang dibiayai.

### Soal Diskusi

1. Jelaskan produk tabungan dalam perbankan syariah dan jenis-jenisnya?
2. Jelaskan produk giro dalam perbankan syariah dan jenis-jenisnya?
3. Jelaskan produk deposito dalam perbankan syariah?



## BAB V. PRODUK PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH

### Tujuan Instruksional:

1. Menjelaskan tentang prinsip jual beli (*ba'i*)
2. Menjelaskan tentang prinsip sewa (*Ijarah*)
3. Menjelaskan tentang prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk di kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

### A. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang yakni ada perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*), dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif. Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

### 1. Pembiayaan *Murabahah*

Syarat *Ba'i al Murabahah* adalah :

- a. Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

*Ba'i al Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem ini juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Namun ada beberapa risiko yang harus diantisipasi antara lain :

- a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- b. Fluktuasi harga komperatif, ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- d. Dijual; karena *ba'i al murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.

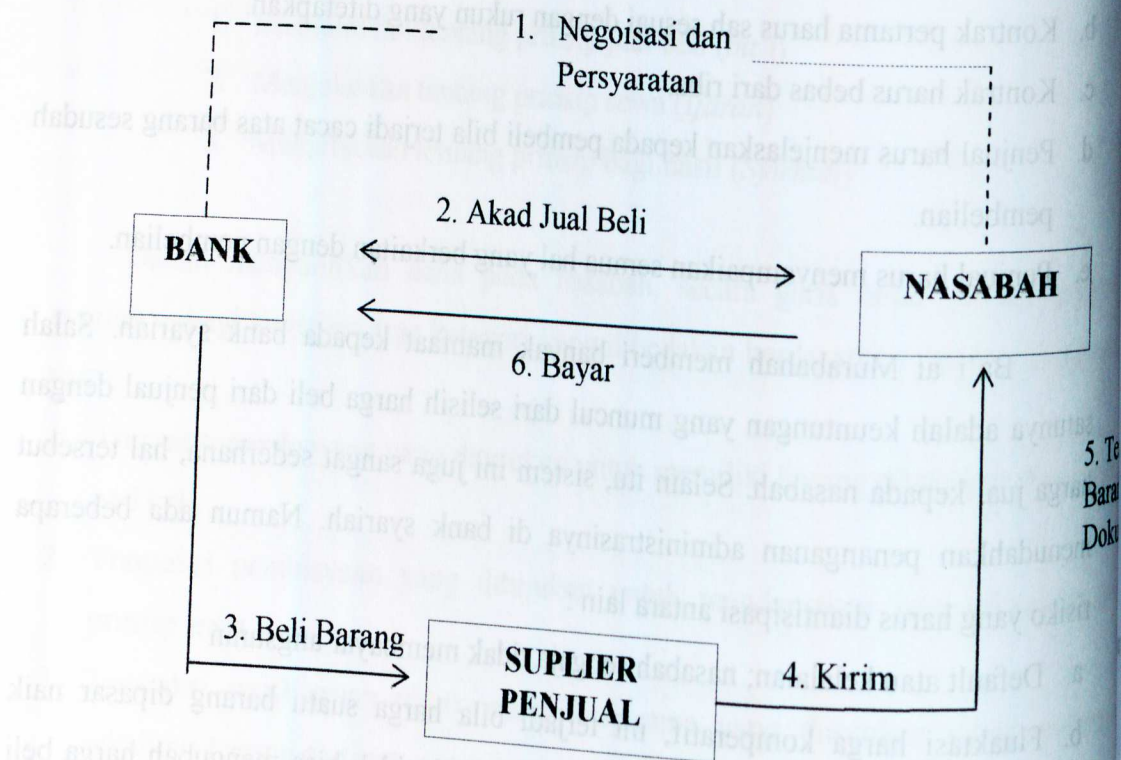
Berikutnya perbedaan Jual Beli (*Murabahah*) pada Bank Islam dan Kredit pada Bank Konvensional:

- a. Pada bank konvensional, ada bantuan kredit untuk pengusaha. Untuk itu, bank menyerahkan uang kepada debitur untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya untuk pinjaman uang itu bank meminta bunga, yang dinyatakan dalam %.
- b. Pada bank Islam, juga ada bantuan untuk pengusaha. Diantaranya, dengan pola jual/ *murabahah*. Caranya bank bukan menyerahkan uang, tetapi bank membelikan barang/jasa yang diperlukan untuk berusaha, kemudian bank



menjualnya kembali kepada pengusaha. Untuk penjualan itu, maka mendapat laba, disebut margin yang dihitung dalam %.

### Skema Ba'i Al Murabahah



## 2. Salam

*Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disalurkan pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah setelah berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum *Salam*:

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan *parallel salam*.

Syarat-syarat jual beli *salam* antara lain sebagai berikut:

### a. Modal Transaksi Bai' As *salam*

#### 1) Modal harus diketahui

Barang yang akan di suplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

#### 2) Penerimaan pembayaran *salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh al muslim (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari muslim ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

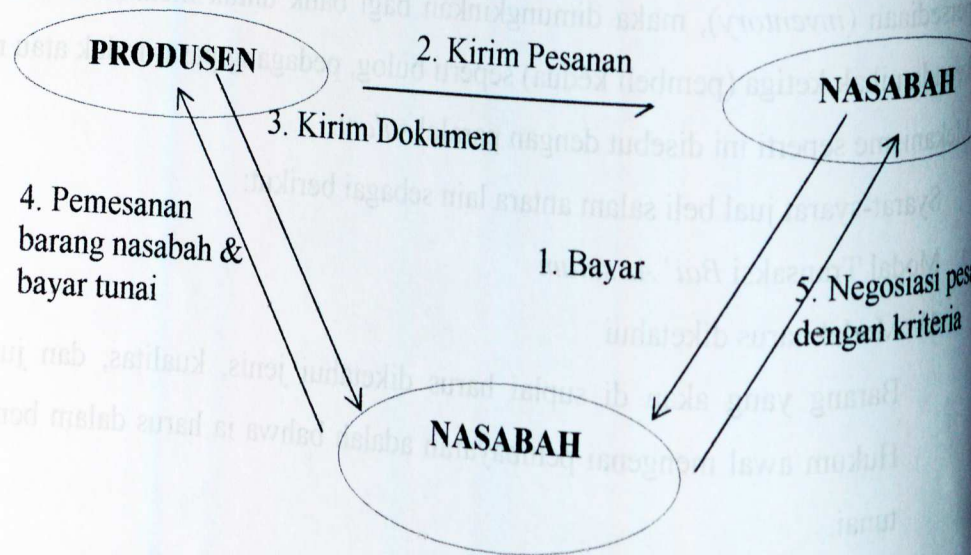
### b. *Al muslim fiih* (Barang)

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut.
- 3) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari
- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera.



- 5) Bolehnya menentukan tanggal waktu dimasa yang akan datang penyerahan barang
- 6) Tempat penyerahan harus sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak berkontrak.
- 7) Penggantian muslim fiih dengan barang lain pada bai' as salam diperkenankan, barang tersebut tidak lagi milik si muslim alaih, tetapi milik muslim (fidz dzimah).

#### Skema Bai' As Salam

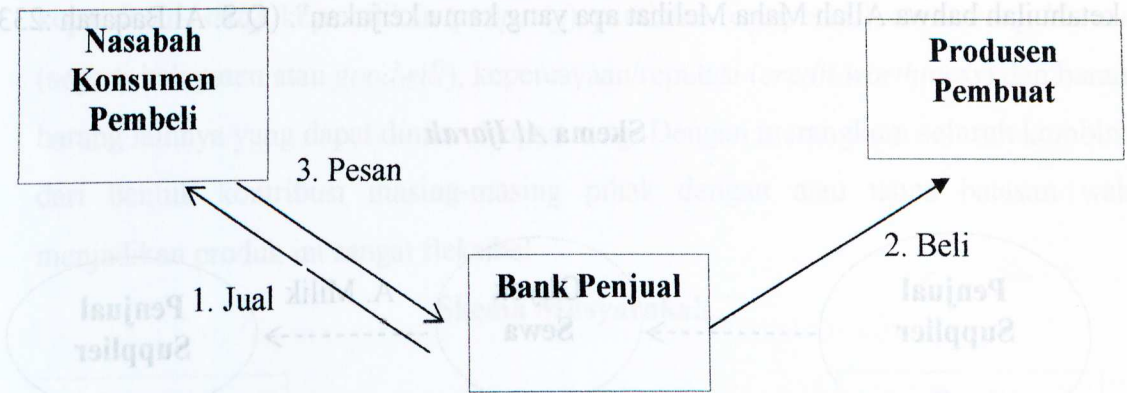


### 3. Istishna

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum:

- Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

#### Skema Bai' al Istishna'



### B. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Namun dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui barang itu sendiri. *Ijarah* tanpa akad pemindahan kepemilikan sebagai operational lease dalam ilmu keuangan konvensional.

Sementara *ijarah muntahia bit tamlik* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi kepemindahan kepemilikan atas barang itu diakhir masa kontrak. Sehingga penyewa memiliki hak untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewaan dan ini yang sering dikenal sebagai *financial lease* dalam ilmu keuangan konvensional. Pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan antara *ijarah* dengan *ijarah muntahia bit tamlik*.

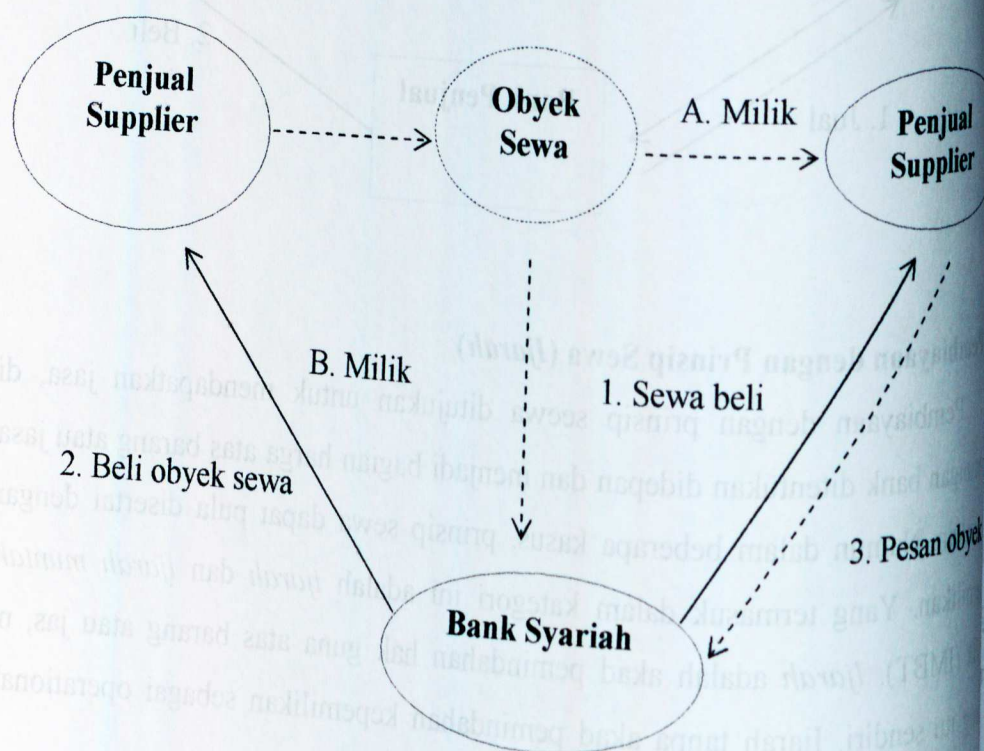
*Al ijarah muntahia bit tamlik* memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang telah disepakati kedua pihak yang berkontrak. Misalnya, al ijarah dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam al ijarah, harga barang dalam transaksi jual, dan kapan kepemilikan dipindahkan.

Adapun dasar hukum bagi ijarah adalah Al Quran surat Al Baqarah ayat 233:



“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al Baqarah)

**Skema Al Ijarah**



### C. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

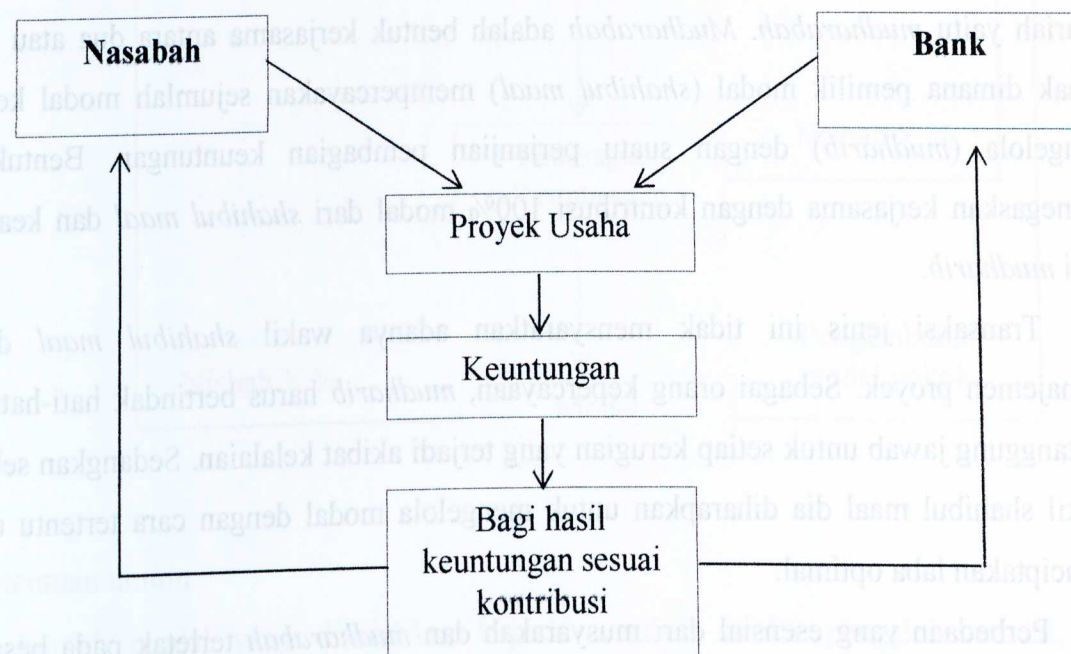
Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah:

#### 1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun berwujud dalam bahasa ekonomi hal ini dikenal sebagai joint venture.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

**Skema Musyarakah**



Ketentuan umum:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
- Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
  - Menarik diri dari perserikatan
  - Meninggal dunia
  - Menjadi tidak cakap hukum



- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bank.

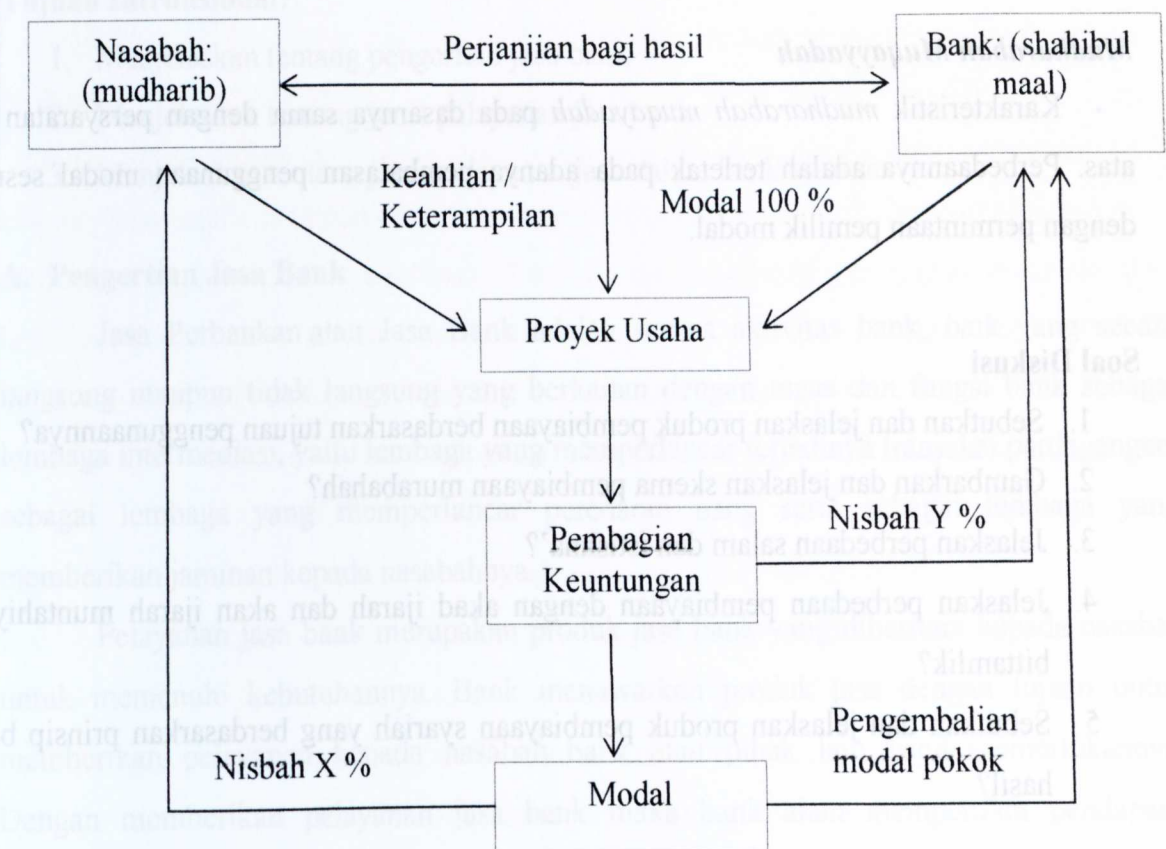
## 2. Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran dan kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk meniadakan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusaka Islam.

## Skema Mudharabah



### Ketentuan umum

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
  - (Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*))
  - (Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*))
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja



- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus dibagi bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bank.

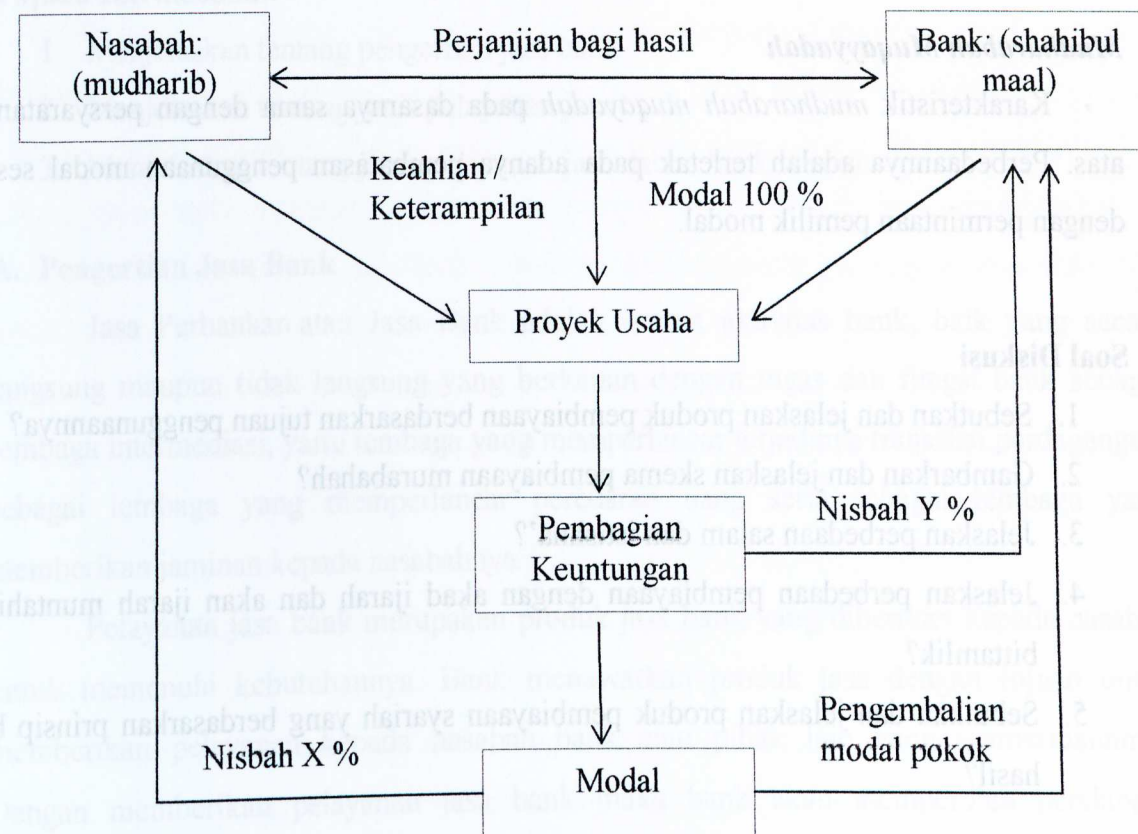
## 2. Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keuntungan dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besaran kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran dan kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak agama Islam.

## Skema Mudharabah



### Ketentuan umum

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
  - (Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*))
  - (Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*))
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja



misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dikenakan sanksi administrasi.

### **Mudharabah Muqayyadah**

Karakteristik *mudharabah muqayyadah* pada dasarnya sama dengan *persyariaan* atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal dengan permintaan pemilik modal.

### **Soal Diskusi**

1. Sebutkan dan jelaskan produk pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan modal?
2. Gambarkan dan jelaskan skema pembiayaan murabahah?
3. Jelaskan perbedaan salam dan istishna'?
4. Jelaskan perbedaan pembiayaan dengan akad ijarah dan akan ijarah *muamalat* bittamlik?
5. Sebutkan dan jelaskan produk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip *prim* hasil?

## **BAB VI. PRODUK JASA PERBANKAN SYARIAH**

### **Tujuan Intruksional:**

1. Menjelaskan tentang pengertian jasa bank
2. Menjelaskan tentang jenis pelayanan jasa bank
3. Menjelaskan tentang jenis pelayanan jasa dalam bank syariah

### **A. Pengertian Jasa Bank**

Jasa Perbankan atau Jasa Bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya.

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan pelayanan jasa bank maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank yang berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan *fee based income*.

Semakin ketatnya persaingan antar bank, membuat bank berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan jasa yang sangat baik. Pelayanan jasa bank akan menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan usaha bank. Pelayanan jasa yang umum diberikan oleh bank syariah menggunakan berbagai jenis akad sesuai dengan karakteristik masing-masing jasa bank syariah.

Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan utamanya, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dari dan kepada masyarakat. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik, hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup berhenti disatu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.



## B. Jenis Pelayanan Jasa Bank

Jenis pelayanan jasa dalam bank umum adalah:

### 1. Transfer (jasa pengiriman uang)

*Transfer* adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima *transfer*. Dalam arti lain, *transfer* pengiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih oleh bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada (transfer). Baik *transfer* uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet cabang lain, cabang lain akan mengkredit.

Jasa pengiriman uang ini merupakan salah satu kegiatan usaha perbankan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu: bank umum dapat melakukan jasa pengiriman uang, baik kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.

Pengiriman uang atau *transfer* lewat bank akan memberikan keuntungan bagi nasabah, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. Seperti pengiriman uang lebih cepat, aman sampai tujuan, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon, tanpa perlu pembayaran rekening dan prosedur mudah dan cepat. Sedangkan bank yang memperoleh biaya kirim, biaya provisi dan komisi.

### 2. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perorangan maupun perusahaan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen yang harus dibayar setelah surat-surat tersebut (pembayar atau tertarik) berada ditempat lain (dalam negeri) menyetujui pembayarannya. Dalam arti lain, Inkaso merupakan kegiatan bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh nasabah.

Warkat yang diinkasokan sama halnya dengan warkat kliring antara lain: cek, bilyet giro, dan warkat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Hasil inkaso atau tagihan yang dilakukan oleh bank dengan menggunakan jasa inkaso memakan waktu yang kurang lebih lima hari kerja.

Bagi pengusaha yang sering kali memerlukan dana segera, jangka waktu penagihan melalui transaksi inkaso di nilai sangat lama. Melihat dari kondisi lambatnya hasil inkaso tersebut, maka BI memberikan jasa yang dapat menggantikan inkaso yaitu *intercity kliring*.

#### a. Warkat Incaso

- 1) *Warkat inkaso* tanpa lampiran yaitu warkat-warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, bilyet giro, wesel, dan surat berharga lainnya.
- 2) *Warkat Inkaso* dengan lampiran yaitu warkat-warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi dan dokumen-dokumen penting.

#### b. Jenis Incaso

- 1) *Incaso Masuk* merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga.
- 2) *Incaso Keluar*, Merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Di sini bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seseorang nasabah bank lain di kota lain.

### 3. Safe Deposit Box

Layanan *safe deposit box* adalah jasa penyewaan penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan jasa aman pada penggunaannya. Kondisi ketidakpastian selalu menambah rasa khawatir terutama menyangkut barang-barang yang bernilai harganya, dalam menentukan pilihan tempat yang aman tentunya harus memilih tempat yang terpercaya.



Penyediaan kotak dan tempat penyimpanan barang dan surat surat berharga yang berbeda. Misalnya dinegara yang berbeda maka resiko keduanya sangat mungkin merupakan salah satu kegiatan usaha bank umum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan yang terjadi. Pembeli membayar uang muka kemudian barang baru dikirim setelah pembayaran pasal 6 huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa usaha bank umum termasuk menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga. Resiko atas transaksi perdagangan luar negeri bisa diminimalkan dengan menggunakan cara pembayaran yang tepat, yang risikonya sangat kecil. Cara pembayaran

Disamping bank umum, bank indonesia juga melakukan kegiatan penyimpanan surat berharga dan barang berharga dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bank indonesia. Oleh karena itu, diadakan ketentuan jenis barang surat berharga yang dapat disimpan, pihak yang dapat menyimpan dan melakukan penyimpanan pada bank indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/16/PBI/2005 tentang penyimpanan sekuritas, surat dan barang berharga. Ketentuan tata cara penyimpanan sekuritas, surat dan barang berharga sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/21/DPM tanggal 1 juli 2005 tentang perihal tata cara penyimpanan sekuritas, surat dan barang berharga pada bank indonesia.

#### 4. *Letter of Credit*

Layanan *Letter of Credit* atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka perdagangan barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut perjanjian yang dapat difasilitasi LC terbatas hanya pada perjanjian jual – beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran.

Perdagangan merupakan suatu aktivitas yang telah lama ada dimuka bumi. Transaksi perdagangan melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila perdagangan ini dilakukan secara langsung dimana pihak penjual dan pembeli bertemu dan melakukan negoisasi tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan lainnya. Maka tidak ada kesulitan dalam melakukan jual beli ini. Kondisi dimana penjual dan pembeli tidak secara langsung bertemu dan bernegoisasi permasalahan akan timbul.

Beberapa permasalahan yang mungkin akan terjadi antara lain tentang barang yang dipesan, cara pengiriman barang serta waktu pengirimannya, dan pembayaran atas pembelian barang tersebut. Pembeli dan penjual berada dalam

#### 5. *Jasa Kliring (Clearing)*

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 dan pasal 17 UUBI, Bank Indonesia mempunyai wewenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Disamping dilakukan oleh bank indonesia, penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan bank Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, bank indonesia telah memberikan sistem kliring yang merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Layanan kliring merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah kliring yang sama. kliring merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh bank indonesia atau pihak lain yang ditunjuk.

Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui kliring atas beban atau untung rekening nasabah atau bank yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring. dalam ketentuan pasal 14 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang warkat yang dapat dilakukan dalam transaksi kliring antara lain: cek, bilyet giro, wesel, nota debet dan lainnya. Proses penagihan warkat melalui kliring ini pada umumnya memakan waktu satu hari.

Ketentuan teknis pembakuan jenis warkat yang dapat dipertukarkan atau diperhitungkan dalam kegiatan penyelenggaraan kliring lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/52/DASP tanggal 31 Desember 2004 perihal warkat dan



dokumen kliring serta pencetakannya pada perusahaan percetakan warkat dan kliring.

Kemudian Bank Indonesia melakukan penyempurnaan atas penyelesaian kliring diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia 2/14/PBI/2000 dengan menetapkan ketentuan mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Adapun jenis sistem kliring yang dapat digunakan dalam kegiatan penyelesaian kliring antara lain:

- Sistem kliring secara manual
- Sistem kliring semi otomatis atau kliring lokal
- Sistem kliring otomatis
- Sistem kliring elektronik

Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia terdiri dari sistem kliring yaitu Kliring Debet dan Kliring Kredit dan proses penyelesaian dilakukan dalam dua tahap yaitu Kliring penyerahan dan Kliring retur dan penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring antara lain kliring keluar, masuk dan pengembalian kliring.

Jadwal penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia diatur Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/27/DASP tanggal 22 juli 2005 tentang penyelenggaraan sistem kliring nasional indonesia. Dan biaya penyelenggaraan Kliring Nasional Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia 7/28/DASP tanggal 22 juli 2005 mengenai ketentuan jenis dan besarnya biaya perhitungan dan pembebanan biaya dalam penyelenggaraan sistem kliring indonesia.

Tujuan penyelenggaraan kliring oleh bank indonesia adalah:

- Memperluas dan mendukung kelancaran sistem pembayaran secara giral (tunai).
- Membantu dan mempercepat penyelesaian perhitungan seketika mengenai piutang baik atas nama bank maupun nasabah.

- Memberikan pelayanan kepada nasabah.

## 5. Bank Card (kartu kredit)

*Bank card* atau lebih dikenal dengan sebutan kartu kredit atau juga kartu plastik, kartu ini dapat digunakan atau dibelanjakan di berbagai tempat hiburan dan tempat pembelanjaan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar diberbagai tempat-tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran yang besarnya dikeluarkan tergantung dari bank yang mengeluarkannya.

Sesuai dengan peraturan bank indonesia nomor 7/52/PBI/2005 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sebagaimana diubah dengan peraturan bank indonesia nomor 10/8/PBI/2008, bahwa penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) tidak hanya dilakukan oleh bank, melainkan dapat pula dilakukan oleh lembaga selain bank, baik bertindak sebagai prinsipal dan penerbit. Kemudian dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/59/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal tata cara penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu , diantaranya mengenai ketentuan dan persyaratannya sebagai AMPK yaitu prinsipal, penerbit, acquirer. Dan berkenaan dengan penerapan prinsip perlindungan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan APMK, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian, serta peningkatan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu tersebut dapat berupa:

- Kartu kredit
- Kartu *Automated Teller Machine* (ATM)
- Kartu debet
- Kartu prabayar
- Kartu prabayar *singel-purpose*
- Kartu prabayar *multi-purpose*

Adapun jenis-jenis bank card yang ada saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Charge card*



- *Credit card*
- *Debet card*
- *Smart card*
- *Private label card*

## 7. Bank Garansi

Layanan bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada dalam rangka membiayai suatu usaha dan lainnya. Dengan jaminan bank ini si peusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dahulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.

Bank garansi merupakan salah satu bentuk peminjaman utang dalam perbankan, yang merupakan salah satu bentuk layanan jasa bank kepada masyarakat menjadi nasabahnya. Dalam bank garansi ini, bank mengikat diri untuk kepentingan guna menjamin atau menjadi penjamin bagi nasabahnya. Pada prinsipnya bank merupakan perjanjian penjaminan utang, karenanya ketentuan-ketentuan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata berlaku bagi bank garansi.

Selain merujuk kepada ketentuan-ketentuan perjanjian penanggungan sebagai diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, penerbitan bank garansi berdasarkan pula kepada surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU masing-masing tanggal 18 maret 1991 tentang pemberian garansi oleh bank, yang mencabut dan menggantikan ketentuan yang sebagaimana termuat dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/10/KEP/DIR dan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/UPPB masing-masing tanggal 28 maret 1979 tentang pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan lembaga keuangan bukan bank.

## 8. Perdagangan valuta asing (valas)

Istilah lain dari perdagangan valuta asing adalah pasar valuta asing (*exchange dealing*), yaitu pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Istilah ini lebih luas dari itu. Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang

perdagangan valuta asing (valas) adalah perdagangan surat-surat berharga jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) diperdagangkan. Surat-surat berharga tersebut tidak selalu dalam valuta yang sama. Valuta yang diperdagangkan adalah valuta yang berbeda satu sama lainnya.

Adapun jenis-jenis transaksi dalam perdagangan valuta asing adalah sebagai berikut:

- Transaksi *spot* (transaksi tunai)
- Transaksi *forward* (transaksi berjangka/tunggak)
- Transaksi *swap* (transaksi barter)

Dalam rangka kesinambungan peraturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1967 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1965 tentang tata cara penggunaan, pembebanan, pemindahan hak atas devisa yang tidak diharuskan untuk diserahkan kepada dana devisa (devisa pelengkap), dan upaya melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang pedagang valuta asing, yang mencabut dan mengganti peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2004 tentang pedagang valuta asing.

Ketentuan teknis mengenai tata cara perizinan dan pelaporan bagi bank umum dan BPR dan BPRS yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing, lebih lanjut diatur dalam:

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/36/DPNP tanggal 19 desember 2007 perihal tata cara perizinan dan pelaporan bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/38/DPBPR tanggal 28 desember 2007 perihal tata cara perizinan dan pelaporan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing.

## 9. Payment

Layanan payment merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabahnya. Bank akan mendapatkan *fee* atas pelayanan jasa yang diberikan



Beberapa pelayanan jasa (*payment*) yang diberikan oleh bank kepada nasabah antara lain:

- a. Pembayaran telepon
- b. Pembayaran rekening listrik
- c. Pembayaran pajak
- d. Pembayaran uang kuliah
- e. Pembayaran gaji

## 10. e-banking

Layanan ini merupakan layanan perbankan dengan menggunakan fasilitas *banking SMS* dan menggunakan *internet banking*. Kedua fasilitas tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

- a. *mobile banking* adalah layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang akses melalui ponsel dengan fasilitas ini nasabah dapat bertransaksi melalui dengan mengirimkan SMS dan semua transaksi dilindungi dengan PIN pribadi diberikan kepada nasabah.
- b. *Internet banking* adalah layanan perbankan melalui internet yang dapat diakses dimana saja tanpa batas waktu dan negara.

## C. Jenis pelayanan jasa dalam Bank Syariah

### 1. Al-Wakalah (Perwakilan)

Wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyera mendelegasikan, mewakilkan atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Wakalah diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain untuk menjalankan amanat tertentu dalam aplikasi perbankan, bank syariah sebagai penerima mandat, mendapat kuasa dari nasabah untuk mewakilkan urusannya.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan mandat kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

Syarat dan kriteria wakalah dalam aplikasi perbankan adalah sebagai berikut:

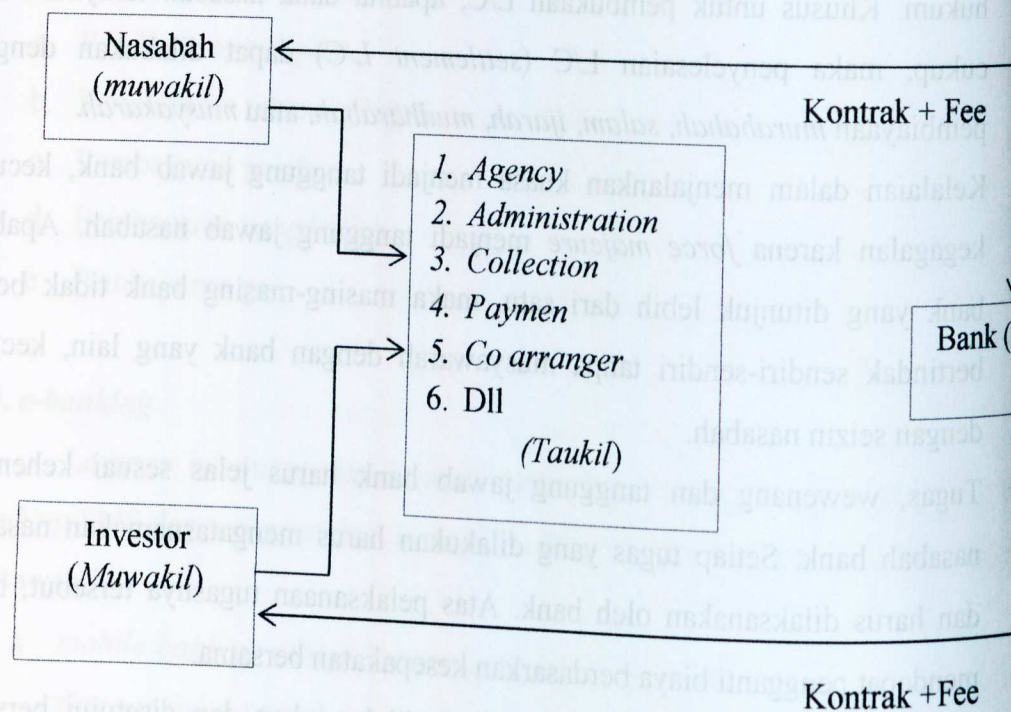
- c. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah*.
- d. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.
- e. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

Adapun jenis-jenis pelayanan jasa yang diberikan bank syariah menggunakan akad wakalah antara lain:

- a. Kiriman uang (*Transfer*)
- b. Kliring (*clearing*)
- c. *Incasso*
- d. *Intercity clearing*
- e. *Letter of credit*
- f. *Payment*



## Skema Wakalah



## 2. Al-kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam per lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai pen Kafilah memiliki beberapa macam yaitu :

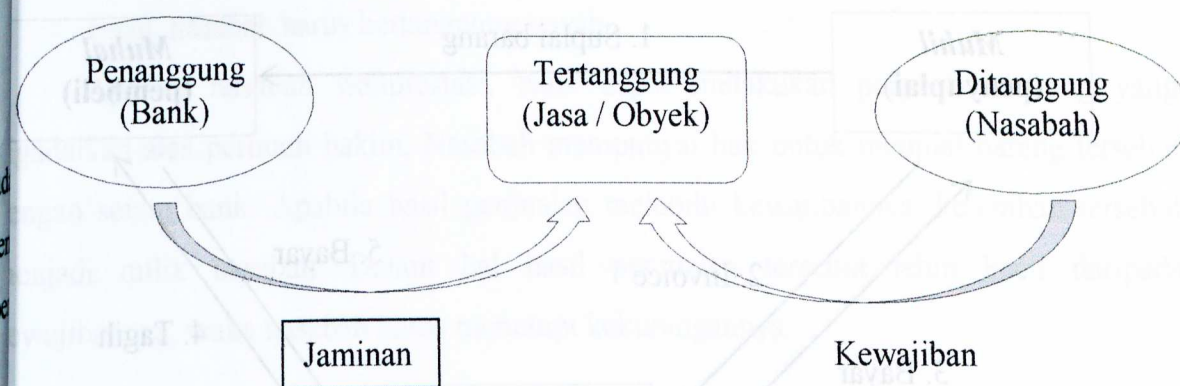
- Kafalah bin nafs* : merupakan akad memberikan jaminan atas diri (a guarantee).
- Kafalah bil maal* : merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan kewajiban.
- Kafalah bit taslim*: merupakan jaminan pengembalian atas barang yang telah sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.
- Kafalah al munjazah* : merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh waktu dan untuk kepentingan/ tujuan tertentu.
- Kafalah al muallaqah* : merupakan penyederhanaan dari kafalah al munjazah oleh industri perbankan maupun asuransi.

Dalam akad kafalah diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjamin kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitur, yang mana

ang penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditor akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi. Pemberi jaminan disebut *kafil* dan yang dijamin disebut *makful*.

Produk *al-kafalah* yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk bank garansi. Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain, dan berbagai macam jaminan bank lainnya. Dengan mendapat bank garansi, pihak yang memberikan pekerjaan akan merasa aman. Pemberi kerja tidak perlu menagihkan kepada pihak terjamin, tetapi dapat menagihkan kepada bank yang menerbitkan bank garansi, apabila terdapat wanprestasi dari pihak yang terjamin.

## Skema Kafalah



Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

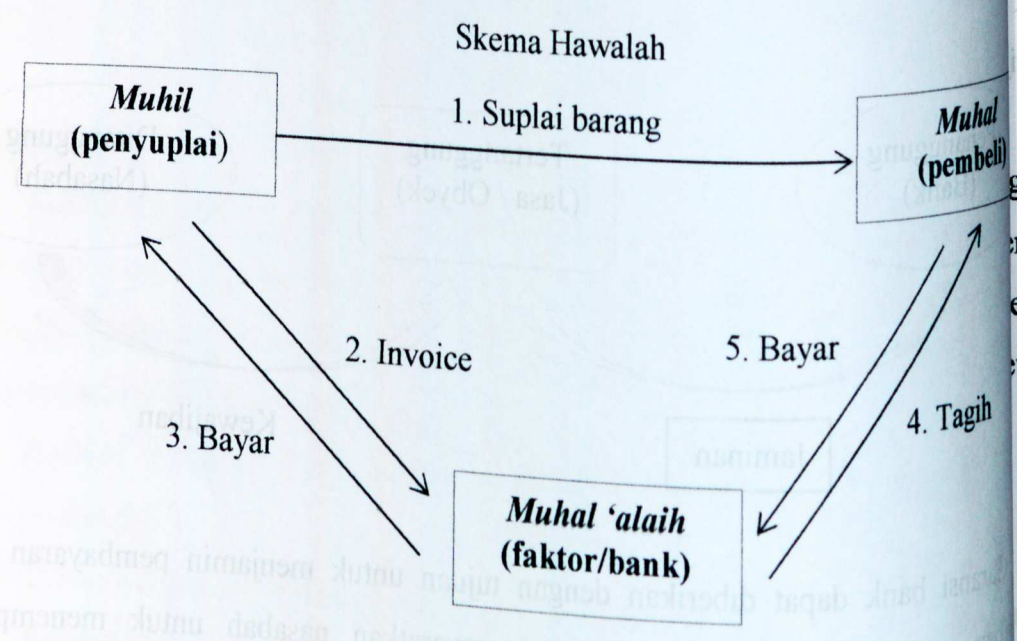
## 4. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

*Hiwalah* adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan



penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi untuk memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang supplier bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

- Beberapa produk jasa bank syariah yang menggunakan akad *hiwalah* antara lain:
- a. *factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga.
  - b. *Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membeli dahulu piutang tersebut.
  - c. *Bill discounting* pada dasarnya sama dengan *hiwalah* namun dalam *bill discounting* nasabah harus membayar *fee*.



#### 4. Ar-Rahn

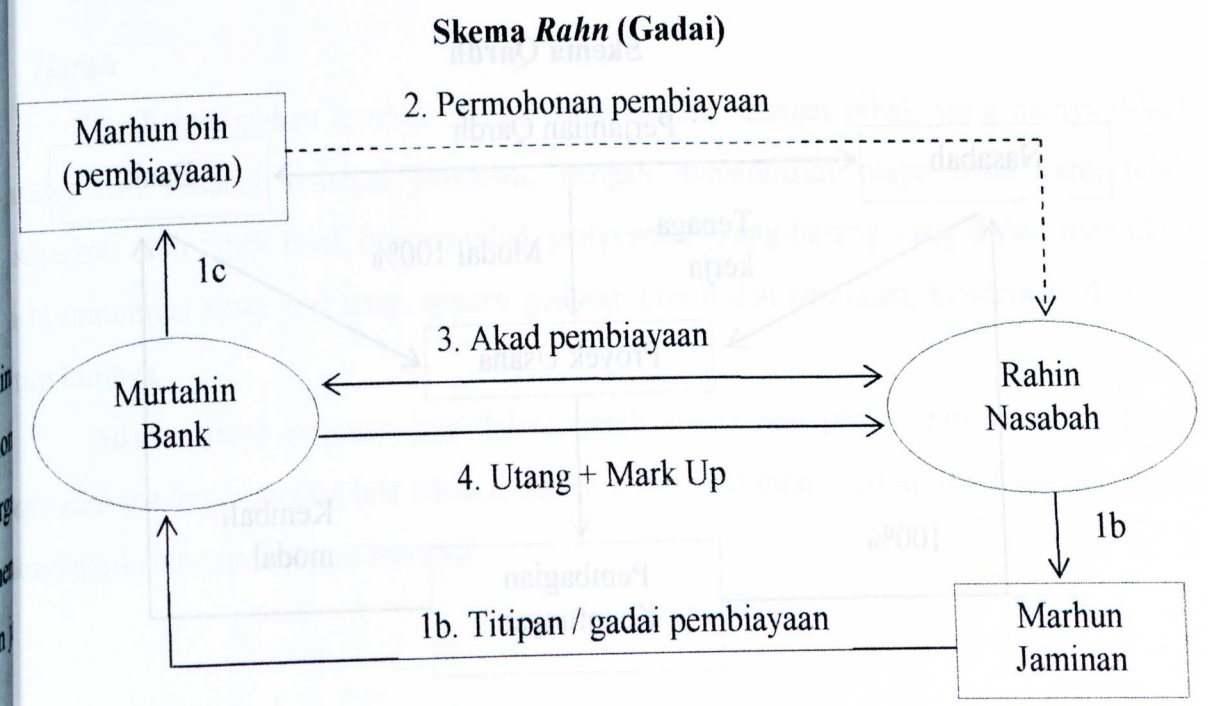
*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, nilai jual sekurang-kurangnya serta dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat menerima kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Tujuan akad *rahn* adalah memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Produk *rahn* dalam perbankan dapat dipakai sebagai produk pelengkap sebagai jaminan dalam pembiayaan, ataupun sebagai produk tersendiri atau yang biasa dikenal dengan gadai. *Ar-rahn* atau *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- a. Milik nasabah sendiri
- b. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil daripada kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.





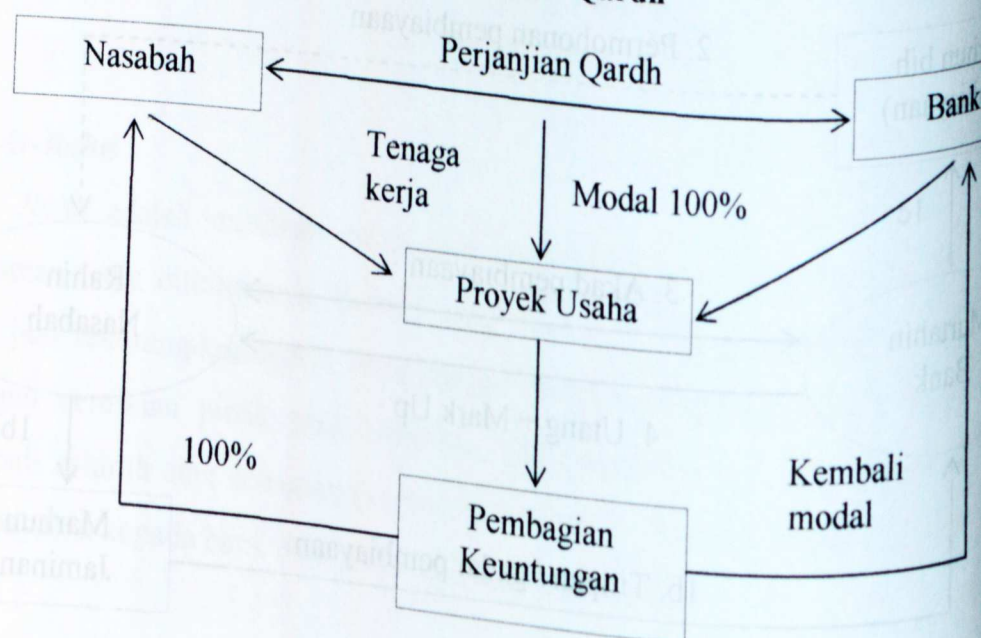
## 5. Al-qardh

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya imbalan tambahan yang diminta oleh bank syariah.

Adapun aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- Sebagai pinjaman tunai (*cas advanced*) dari produk kartu kredit syariah nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan memberatkan sipengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli dan bagi hasil.
- Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gaji.

### Skema Qardh



## As-sharf

Merupakan pelayanan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. Pertukaran antara valas dan rupiah dibolehkan apabila pertukaran ini ditujukan untuk spekulasi. Artinya *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. *Sharf* dapat diartikan transaksi jual beli antara mata uang yang satu dengan mata uang lainnya. Misalnya antara US dollar dan rupiah, dan singapore dollar dengan Malaysia ringgit.

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

Transaksi *sharf* dapat dibenarkan jika sesuai dengan persyaratan antara lain:

- Nilai tukar antar mata uang yang akan diperjualbelikan telah dikuasai secara langsung oleh penjual dan pembeli. Penguasaan dimaksud ialah terkait dengan fisik maupun hukumnya.
- Bila pertukaran antara mata uang yang sejenis, maka jumlah dan nilainya harus sama.
- Dalam *sharf* tidak boleh ada tenggang waktu antara transaksi dan saat penyerahan uang, artinya pertukaran ini harus dilakukan secara tunai.
- Transaksi *sharf* tidak untuk spekulasi, akan tetapi transaksi terjadi karena kedua pihak saling membutuhkan untuk melakukan jual beli mata uang.

## Ijarah

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang telah disepakati oleh pihak bank dengan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan umumnya yaitu aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya.

Adapun jenis kegiatan jasa dalam ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*safety deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Kemudian bank mendapatkan sewa dari jasa tersebut.



## Soal Diskusi

1. Jelaskan pengertian jasa bank?
2. Sebutkan jenis-jenis pelayanan jasa bank?
3. Sebutkan jenis-jenis pelayanan jasa dalam bank syariah

## BAB VIII.

### BAB VII. PERAN SOSIAL PERBANKAN SYARIAH

#### Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan tentang fungsi bank syariah
2. Menjelaskan tentang peran bank syariah

#### A. Fungsi Bank Syariah

Apabila selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai intermediary (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, maka dalam bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi bank syariah yaitu manajer investasi, Investor, Jasa keuangan dan sosial. Fungsi-fungsi ini dapat diuraikan menjadi berikut :

##### 1. Manajer investasi

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang bekerja di bank syariah (bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.

##### 2. Investor

Bank-bank menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut



meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad Mudharabah, salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, sedangkan bank menerima keuntungan Mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad.

### 3. Jasa Keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti misalnya memberikan pelayanan kliring, transfer, inkas, pembayaran gaji dan sebagainya hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan berdasarkan *agency contract* atau sewa. Contohnya meliputi *Letter of guarantee*, *transfer*, *letter of credit*, dll.

### 4. Fungsi sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.

## B. Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga komersial yang dibingkai nilai-nilai spiritual. Salah satu konsekuensi dari nilai spiritual itu adalah terintegrasinya sektor sosial di tubuh bank syariah. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya mempunyai manfaat secara ekonomi tetapi juga manfaat sosial.

Di antara peranan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.

3. Menjalin kerja sama dengan para ulama, karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan Bank dan Non Bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% sampai 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan *Baitul Mal wa Tamwil*.

Secara khusus peran bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

1. Menjadi peranan nasionalisme baru, artinya bank syariah menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu bank syariah perlu mencontohkan keberhasilan tarekat dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujudnya jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan return yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.



4. Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga namun dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan qardhul hasan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
6. Peningkatan efisiensi mobilitas dana. Artinya, adanya produk al-mudharabah, al-muqayyadah berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai finansial arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil bukan karena spread bunga.
7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam menyelenggarakan usaha bank. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

Kegiatan perbankan syariah di dasari oleh asas, tujuan dan fungsi perbankan syariah di dalam melakukan kegiatan usahanya yang berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat yaitu:

1. Untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Untuk menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*.
3. Untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakil*).
4. Membantu lembaga-lembaga dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk keperluan khusus, misalnya bencana alam

Ada tiga hal utama yang mendorong infiltrasi nilai sosial dalam perbankan syariah

Pertama, sebagai implementasi dari ketentuan syariah yang mewajibkan zakat

mensunahkan infaq, dan shodaqoh (ZIS). Kedua, bank syariah terikat oleh karakteristik yang dikandung ekonomi syariah, yakni persaudaraan (ukhuwah), keadilan (adalah), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), universalisme (alamiyah). Ketiga, adanya social/voluntary sector dalam ranah ekonomi syariah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi sosial, bank syariah mempunyai beragam sumber dana dan penyaluran dana sosial. Salah satu realisasi fungsi sosial bank syariah, berkaca pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, adalah sebagai lembaga yang menerima dana sosial seperti Zis dan menyalurkannya atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah. Zis sendiri adalah sumber dana sosial yang terbesar di bank syariah.

#### Soal Diskusi

1. Jelaskan fungsi bank syariah?
2. Menjelaskan tentang peran bank syariah sebagai fungsi sosial?

12/01/FEB/01/2017





## BAB VIII. PENGELOLAAN SISTEM KEUANGAN

### PERBANKAN SYARIAH

#### Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan tentang prinsip pengelolaan sistem keuangan perbankan syariah
2. Menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank syariah
3. Menjelaskan tentang penggunaan dana bank syariah
4. Menjelaskan tentang pembagian keuntungan (*profit distribution*)

#### A. Prinsip Pengelolaan Sistem Keuangan Perbankan Syariah

Praktik pengelolaan sistem keuangan perbankan syariah telah dilakukan sepanjang zaman kekayaan isla. Namun seiring melemahnya sistem khalifah pada akhir abad ke-11, dinasti ottoman memperkenalkan sistem perbankan barat pada dunia islam.

Filosofi sistem keuangan “bebas bunga” (larangan riba) tidak hanya melibatkan interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Melalui sistem kerjasama bagi hasil maka akan ada pembagian resiko. Resiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga resiko diterima oleh pemberi modal.

Berikut ini adalah sistem pengelolaan keuangan syariah yang diatur melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah :

##### 1. Pelarangan Riba

Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Oleh karena itu sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman/pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama. Padahal untung itu baru diketahui setelah berlakunya waktu bukan hasil pemberian modal dimuka.

Imam Razi mencoba menjelaskan alasan mengapa bunga dalam islam dilarang, antar lain (Qardhawi, 2001):

- a. Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan pinjaman jatuh miskin karena dieksploitasi

- b. Riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat hartanya dengan transaksi riba, baik secara tunai maupun berjangka
- c. Riba hanya akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam bidang pinjam meminjam.
- d. Pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin.

##### 2. Pembagian Resiko

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba yang menetapkan hasil pemberi modal dimuka. Sedangkan melalui pembagian resiko maka pembagian hasil akan dilakukan dibelakang yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua pihak saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan.

##### 3. Tidak Menganggap Uang Sebagai Modal Potensial

Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kehidupan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (Laba). Sedangkan dalam fungsinya sebagai modal nyata (Capital), uang dapat menghasilkan sesuatu (bersifat produktif) baik menghasilkan barang maupun jasa. Oleh sebab itu, sistem pengelolaan keuangan syariah memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersama dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba.

##### 4. Larangan Melakukan Kegiatan Spekulatif

Hal ini sama dengan pelanggaran untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi dan transaksi yang memiliki resiko yang sangat besar.

##### 5. Kesucian Kontrak

Oleh karena itu islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi resiko yang asimetri dan timbulnya moral hazard

##### 6. Aktivitas Usaha Harus Sesuai Syariah

Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah.



Jadi, prinsip pengelolaan sistem keuangan perbankan syariah mengacu pada prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*) tidak ada pihak di dzhalimi dan mendzhalimi (*tazhlimuna wa la tuzhlamun*), hasil biaya muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama resiko.

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Al Qur'an yaitu:

1. *Prinsip At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an: "....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS 5:2).
2. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..." (QS 4:29).

Di antara prinsip-prinsip *syar'i* dalam sistem keuangan yaitu :

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.
2. Bebas dari *maghrib* ( *maysir*, yaitu judi: *gharar*, *gharar*, yaitu ketidakpastian/penipuan; dan *riba*, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara Batil (tidak sah)
3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak pilih.

6. Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu)
7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
8. Mengimplementasikan zakat

Sedangkan prinsip-prinsip *tabi'i* adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen cash flow, manajemen risiko dan lainnya

Dengan demikian, sistem keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip *syar'i* yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah dan prinsip *tabi'i* yang merupakan hasil interpretasi akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi lainnya yang relevan.

Oleh karenanya sistem keuangan syariah memiliki karakteristik yang unik. M. Umer Chapra menyebutkannya antara lain:

1. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal. Jika sumber daya manusia dan sumber daya alam didayagunakan secara efisien, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Tetapi dalam Ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sendiri, bukan menjadi tujuan utama. Hal ini disebabkan karena kesejahteraan material dalam Islam menghendaki:
  - a. Bahwa kesejahteraan material tak boleh dicapai melalui produksi barang dan jasa yang dilarang syariah, seperti memproduksi miras, judi, narkoba, pelacuran, dan sebagainya.
  - b. Tidak boleh memperlebar jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan.
  - c. Tidak boleh membahayakan generasi sekarang atau generasi mendatang serta tidak boleh merusak lingkungan hidup.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya penting selama ia memberikan *full employment* dan kelayakan ekonomi yang luas.

2. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Kebijakan moneter menurut Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan /kesejahteraan bagi seluruh rakyat



dengan dasar persaudaraan universal. Al-Qur'an dan Sunnah sangat menekankan tegaknya keadilan dan persaudaraan. Dengan demikian, keadilan dan persaudaraan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam, sehingga realisasinya dalam kebijakan moneter menjadi komitmen spiritual bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

3. Stabilisasi nilai mata uang untuk meningkatkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran cicilan, dan alat penyimpan yang stabil. Stabilitas mata uang, tidak bisa dilepaskan dari tujuan syariah. Ini mempunyai pengertian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang jujur. Menerima saja inflasi sama saja menerima penyakit dan membahayakan hilangnya kemampuan perekonomian untuk bergerak dalam pertumbuhan. Karena itu inflasi harus ditangani secara bijak. Negara-negara yang mempunyai kemampuan besar untuk mengatasi tekanan-tekanan inflasi adalah yang paling berhasil dalam mencapai dan memelihara tingkat pertumbuhan ekonomi dan *employment* yang lebih tinggi.
4. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Tabungan yang masuk dalam lembaga perbankan dapat diproduktifkan bagi kesejahteraan rakyat. Islam sangat mencela sifat menahkakan harta dan sekaligus menuntut agar harta tersebut digunakan untuk kegiatan produktif. Meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa bukan tidak mungkin bagi pemilik harta untuk memproduktifkan hartanya sendiri, tetapi dalam kenyataan banyak sekali ditemukan pemilik harta yang tidak ahli dalam mengembangkan hartanya dengan produktif, karena itu ia dapat memproduktifkannya melalui lembaga keuangan/perbankan.
5. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif secara normal diharapkan dalam sistem perbankan/keuangan. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan untuk meningkatkan stabilitas moneter yang mengamankan kepentingan kaum fakir miskin.

## B. Sumber-Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan mas-

pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tapi berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada satu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.

Sumber dana bank syariah terdiri dari:

1. Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Modal inti terdiri dari:
  - Modal yang disetor oleh para pemegang saham, hal ini dikarenakan sumber utama dari modal perusahaan adalah saham.
  - Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari.
  - Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.
2. Quasi ekuitas (*mudharabah account*)  
Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antar keduanya dengan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai pengusaha, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:
  - Rekening investasi umum
  - Rekening investasi khusus
  - Rekening tabungan *mudharabah*
3. Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan



Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

### C. Penggunaan Dana Bank Syariah

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank yaitu:

#### 1. Aktiva yang menghasilkan

Aktiva yang menghasilkan adalah berupa investasi dalam bentuk:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan
- Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli
- Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa
- Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya

#### 2. Aktiva yang tidak menghasilkan

Aktiva yang tidak menghasilkan terdiri dari:

##### a. Aktiva dalam bentuk tunai.

Aktiva dalam bentuk tunai terdiri dari uang tunai dalam vault, cadangan likuiditas yang harus dipelihara pada bank central, giro pada bank dan barang-barang tunai lainnya yang masih dalam proses penagihan.

##### b. Qard (pinjaman)

Pinjaman *Qard al hasan* adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.

##### c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas ini terdiri dari bangunan gedung, kendaraan, dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

### D. Pembagian Keuntungan (*Profit Distribution*)

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa :

1. Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk Investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* (unrestricted investment account). Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *Mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *Shahib al Maal*, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan Nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.
2. Rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment account*). Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.
3. Rekening Tabungan *Mudharabah*, Prinsip *mudharabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Dengan demikian tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa. Dalam aplikasinya bank syaria'h melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk targeted saving, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu. Tidak seperti bank konvensional, Bank Syariah tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari investasi *mudharabah*. Bank Syariah juga tidak



menjamin keuntungan atas investasi *mudharabah*. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi *mudharabah* tergantung pada performance dari bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan performancenya.

4. Dana Titipan (*wadiah / non remunerated deposit*), dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.
  5. Rekening Giro *wadiah*, bank syariah dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadiah*. Dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadiah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadiah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadiah*. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada pemilik dana. (pemegang rekening *wadiah*).
- Ciri-ciri giro *wadiah* adalah sebagai berikut:
- a. Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya;
  - b. Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan menyetor sejumlah dana minimum (yang ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank) sebagai setoran awal;
  - c. Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia;
  - d. Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya;
  - e. Tipe rekening :

- a) Rekening perorangan,
  - b) Rekening pemilik tunggal,
  - c) Rekening bersama (dua orang individu atau lebih),
  - d) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum,
  - e) Rekening perusahaan yang berbadan hukum,
  - f) Rekening kemitraan,
  - g) Rekening titipan;
- f. Servis lainnya :
- a) Cek istimewa,
  - b) Instruksi siaga (*standing instruction*),
  - c) Transfer dana otomatis;
  - d) Kepada pemegang rekening akan diberikan salinan rekening (*statement of account*) dengan rincian transaksi setiap bulan;
  - e) Konfirmasi saldo dapat dikirimkan oleh bank kepada pemegang rekening setiap enam bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemegang rekening.

Rekening tabungan *wadiah*, prinsip *wadiah yad dhamanah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

Ciri-ciri rekening tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut :

- Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM;
- Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank;
- Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja;

Tipe rekening :



- Rekening perorangan,
- Rekening bersama (dua orang atau lebih),
- Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum,
- Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening),
- Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan);

Pembayaran bonus (hibah) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan Bank Syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan wadiah, walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening wadiah.

### Soal Diskusi

1. Jelaskan prinsip pengelolaan sistem keuangan perbankan syariah?
2. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank syariah?
3. Jelaskan penggunaan dana bank syariah?
4. Jelaskan pembagian keuntungan (*profit distribution*) dalam bank syariah?

## BAB IX. KAPITA SELEKTA : PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

### Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan tantangan perbankan syariah
2. Menjelaskan kebijakan pengembangan bank syariah di Indonesia
3. Menjelaskan *grand strategy* pengembangan pasar perbankan syariah

### A. Tantangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia dalam perkembangannya, tentu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, yang dengan mudahnya akan diterima seluruh khalayak masyarakat baik pengguna jasa perbankan secara khusus maupun kalangan masyarakat secara umum. Terutama dari segi historikal dan politik. Negara kita baru mulai mencoba menjadikan perkeonomian syariah khususnya perbankan syariah menjadi instrument perekonomian yang turut dan berpengaruh dalam kemajuan bangsa ini.

Khusus tentang Perbankan Syari'ah, Karnaen Perwataatmaja merumuskan tantangan internal atau kelemahan kita adalah :

1. Masih terdapat berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank syariah.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat
3. Masih terbatasnya jaringan pelayanan
4. Moral hazard
5. Tantangan Eksternal
  - a. Pihak-pihak yang tidak senang dengan berkembangnya ekonomi syari'ah bersatu untuk menghambat perkembangannya : menghambat UU, PP, sosialisasi dan implementasi di masyarakat
  - b. Ekonomi Islam dikait-kaitkan dengan fanatisme agama
  - c. Kompetisi teknologi, pelayanan dan perkembangan produk dari sistem keuangan konvensional (sekuler).

Menurut sumber lain, ada beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian umat Islam. Pertama, dampak globalisasi, misalnya pesaing dari LKS asing. Kedua, persaingan di bidang layanan (servis), termasuk di bidang teknologi informasi (TI). Ketiga,



dukungan setengah hati dari pemerintah. Keempat, masih terbatasnya SDM yang andal. Kelima, pemahaman masyarakat tentang LKS dan bunga bank haram. Masih ada masyarakat yang masih kurang peduli terhadap hal tersebut.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking sistem* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam

lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

## **B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia". Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

"Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.



Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

### C. Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di

ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

2. Program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah "bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking".
3. Program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.
4. Program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
5. Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan
6. Program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

### Soal Diskusi

1. Jelaskan tantangan yang dihadapi bank syariah?
2. Jelaskan kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia?



3. Jelaskan tahap implementasi *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah?

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam; analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amir Machmud dan Rukmana. *Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta, Erlangga, 2010.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta, Prenada, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011*. Jakarta : Bank Indonesia, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008*, Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah BI.
- \_\_\_\_\_. *Kodifikasi Produk Bank Syariah*. Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah BI, 2008.
- Gita Danupranata. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta, Salemba Empat, 2013.
- Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Group, 2006.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana-Prenada Media Group, 2011
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- M. Nadratuzzaman Hosen, dkk. *Bankku Syariah*. Jakarta, pkes Publishing, versi e-book, Agustus, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Perbankan Syariah*, Jakarta, pkes Publishing, versi e-book, Agustus, 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, edisi kedua, 2007.
- Muhammad. *Bank Syariah; Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014



Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Bank Islam*. Bandung. Penerbit Pustaka, 2002.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.

Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2005.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana-Prenadamedia Group, 2014.

UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Zainul Arifin. *Memahami Bank Syariah*. Bandung, Alvabet, 2000.

\_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Bandung. Alvabet.

Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta, Prenada, 2005.

## DAFTAR ISTILAH

**Bank Syariah**, Mencakup bank umum syariah, BPR Syariah dan Unit Usaha Syariah dari bank umum konvensional

**BPRS**, Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah

**Mudharabah**, Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola

**Mudarib**, Dalam kontrak *mudharabah*, salah satu orang atau pihak yang bertindak sebagai pengusaha

**Murabahah**, Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati

**Musarakah**, Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

**Riba**, Secara harfiah berarti penambahan atas harta pokok pinjaman karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga.

**Shahibul maal**, Dalam kontrak *mudharabah*, seseorang atau pihak yang menginvestasikan modalnya

**Takaful**, Dukungan yang saling menguntungkan yang menjadi dasar untuk konsep asuransi syariah atau solidaritas sesama.

**Unit Usaha Syariah**, Unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.



## DAFTAR SINGKATAN

ATM	Anjungan Tunai Mandiri
BAMUI	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
BAPEPAM	Badan Pengawas Pasar Modal
BAZIS	Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BUK	Bank Umum Konvensional
BUS	Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
CAR	Capital Adequacy Ratio (Rasio Kebutuhan Penyediaan Modal minimum)
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPS	Dewan Pengawas Syariah
DSN	Dewan Syariah Nasional
FDR	Financing to Deposit Ratio (analog dengan LDR pada bank konvensional)
FKPPS	Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah
GCG	Good Corporate Governance
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
IFSB	Islamic Financial Services Board
IIFM	International Islamic Financial Market
IMA	Investasi Mudharabah Antar-bank berdasarkan Syariah
IT	Information Technology (Teknologi Informasi)
KCS	Kantor Cabang Syariah
KCK	Kantor Cabang Konvensional
KCPS	Kantor Cabang Pembantu Syariah
KK	Kantor Kas
LDR	Loan to Deposit Ratio (Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap DPK)
MES	Masyarakat Ekonomi Syariah

NPL	Non Performing Loan (Kredit bermasalah)
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PLS	Profit and Loss Sharing (Bagi Hasil)
PUAS	Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah
UKM	Usaha Kecil Menengah
US	Unit Syariah
UU	Undang-Undang
UUS	Unit Usaha Syariah

